

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang mutlak diperlukan untuk keperluan sehari-hari, tidak hanya bagi manusia, makhluk hidup yang lain juga sangat membutuhkan air. Banyak kalangan masyarakat yang sangat membutuhkan air terutama untuk masak, mandi, cuci baju dan lain-lain. Bahkan dalam hal pertanian, air sangat dibutuhkan oleh masyarakat petani untuk bercocok tanam. Karena dalam pertanian, air adalah faktor utama yang sangat dibutuhkan dalam segi pengairan ladang. Akan tetapi bila tidak dikelola dengan benar air bisa menjadi sebuah bencana. Kelebihan air, terutama air permukaan bila tidak dikelola dengan benar bisa menimbulkan banjir, genangan dan kelongsoran. Bahkan air juga bisa menjadi bencana yaitu bencana kekeringan.

Air memang tersedia dengan terjadinya hujan dan yang menjadi masalah adalah cukup atau tidaknya hujan dalam memenuhi kebutuhan tanaman maupun area pertanian. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan irigasi sangat tergantung oleh terjadinya hujan, dimana areal pertanian umumnya disebut sawah tadah hujan sehingga sawah tadah hujan hanya digarap pada waktu musim hujan saja¹.

Membicarakan air dalam segi pertanian maka tak lepas dengan pembahasan mengenai irigasi, tak heran jika membahas mengenai irigasi banyak terjadi konflik yang terjadi di dalam masyarakat pertanian. Irigasi merupakan

¹ Nadjadi Anwar, *Pengembangan Sumber Daya Air*, (Surabaya: Kartika Yudha, 1986), hal. 101.

sistem pembagian air dikalangan petani, biasanya melalui aliran sungai maupun pompa yang khusus dibuat oleh pemerintah desa untuk masyarakat petani. Nilai air yang sangat besar bagi masyarakat petani menuntut adanya pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan pertanian. Dengan demikian irigasi merupakan penunjang yang sangat penting untuk kelancaran serta keberhasilan hasil pertanian, terutama pertanian masyarakat Kampung Ciroke Desa Cidadap.

Irigasi air sangat dibutuhkan di seluruh area pertanian terutama pada musim kemarau panjang halnya untuk pengairan ladang-ladang dan tanaman-tanaman yang ada di daerah pertanian, banyak terjadi konflik yang di akibatkan dengan kurangnya pembagian pengelolaan air, banyak orang yang adu mulut, hingga terjadi perkelahian di antara mereka yang mengakibatkan kesalah pahaman atau terjadi aliran irigasi yang kurang merata sehingga banyak kalangan masyarakat yang sering berkelahi demi memperebutkan hak mereka, hal itu dapat membuat mereka terluka aibat kurang meratanya pembagian air di daerah pertanian tersebut. Konflik tersebut dapat selesai ketika salah seorang mengalah atau menyelesaikannya secara kekeluargaan namun jika di antara mereka tidak ada yang mau mengalah atau berkepanjangan terpaksa kedua pihak berujung dikantor Desa, jika Desa tidak sanggup mempersatukan atau mendamaikan kedua belah pihak maka akan berkelanjutan di kepolisian dan akhirnya disidangkan di pengadilan. Banyak warga masyarakat terpecah belah akibat konflik irigasi air, sehingga mereka yang telah mengalami konflik tersebut akan mempunyai dendam peribadi yang dapat berkepanjangan.

Konflik yang dimaksud adalah konflik kepentingan dalam hal pembagian air atau dalam pengelolaannya. Air irigasi pertanian yang sebelumnya mengalir lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan menjadi tersendat sehingga menyebabkan terjadinya kekeringan dengan ketiadaan air. Hal ini disebabkan karena Sebagian petani melakukan perbuatan curang yang dianggapnya bermanfaat bagi area pertaniannya sendiri, namun merugikan sebagian petani yang lain. Sehingga dalam pengelolaan irigasi dapat memungkinkan petani untuk menguasai sebagian besar pengelolaan irigasi agar petani bisa mempertahankan area pertanian mereka.

Pada awal mula adanya sumur bor, petani sering kali memperebutkan debit air untuk keperluan masing-masing, biasanya keperluan tersebut bermula dari petani yang merasa dirugikan oleh pemilik mesin bor. Banyak masyarakat petani mengeluh akibat tidak meratanya pembagian air oleh si pemilik mesin pompa. Disitulah pihak Desa memberikan arahan dan menetapkan sebuah aturan-aturan mengenai pembagian air namun terdapat beberapa dari kalangan petani yang tidak mematuhi aturan yang ada, mereka hanya menginginkan dan mementingkan lahan pertaniannya sendiri tanpa memikirkan lahan pertanian orang lain. Hal demikian rentan akan terbukanya ruang pertikaian antara petani satu dengan yang lainnya.

Peristiwa demikian menjadikan pihak desa untuk membuat satu kebijakan pemberhentian sementara pola irigasi yang menggunakan mesin pompa. Hal ini disadari ataupun tidak, menurut hemat penulis supaya tidak terjadinya pertikaian yang berkepanjangan antar masyarakat petani. Kebijakan sementara yang dikeluarkan pihak desa bukan solusi sebenarnya bagi masyarakat petani.

Kekeringan merupakan ancaman yang paling menakutkan, sebab masyarakat petani akan kehilangan hasil tanaman mereka. Ketakutan yang dirasakan oleh masyarakat petani menjadikan mereka bertindak dan berfikir lebih keras, salah satunya dengan membuat galian sumur yang dalamnya mencapai 10 sampai 16 meter. Galian sumur yang cukup dalam membawa dampak yang cukup besar bagi area pertanian, sebab galian tersebut menghasilkan air yang digunakan untuk mengairi sebagian area lahan pertaniannya. Kendati demikian tidak semua area pertanian terpenuhi oleh air dari galian sumur, sebab surplus air ketika musim kemarau sangat kecil hanya sebagian saja lahan pertanian yang dapat terairi, sebagiannya lagi harus menunggu air terkumpul kembali.

Menggali sumur merupakan dasar sumber air sampai saat ini, dimana metode pengeboran sumur yang modern telah dikembangkan dan dipergunakan secara *ekstentif*. Menggali dengan metode tradisional sumur biasanya kurang lebih dari 20 meter, sedangkan sumur yang menggunakan metode pengeboran bisa mencapai 1800 meter².

Air irigasi dapat diambil dari air permukaan (sungai) dan dari air tanah. Bila diambil dari air permukaan, air harus dibawa atau dinaikan sedemikian rupa agar sampai pada sawah/ladang yang tertinggi, karena air akan mengalir dari tempat yang tertinggi ke tempat yang rendah. Air sungai pada umumnya berada di bawah permukaan sawah/ladang maka harus di upayakan untuk menaikkan air dengan cara menggunakan pompa, membuat bendungan agar air di sungai naik, dan jika keadaan air sungai di atas sawah/ladang maka pengambilan air irigasi dapat

² Endang Pipin Tachyan, *Dasar-Dasar dan Praktek Irigasi*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 252.

dilakukan langsung dengan membelokan sebagian air sungai sesuai dengan kebutuhan³.

Begitu besarnya pengaruh irigasi terhadap dinamika petani dan sektor pertaniannya memotivasi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut. Maka dari itu penulis mengajukan permasalahan diatas untuk dijadikan penelitian yang lebih mendalam, dengan judul **“Pola Pengelolaan Irigasi Dalam Mencegah Terjadinya Konflik”** (Studi Kasus pada Masyarakat Petani di Ciroke Majalengka).

1.2. Identifikasi Masalah

Pengelolaan irigasi dalam bidang pertanian merupakan suatu yang krusial di kalangan masyarakat petani, sentimen kepentingan tiap pemilik lahan untuk mengairi sawahnya sangat besar, sehingga tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar. Konflik tersebut menimbulkan kekerasan fisik percekocokan/adu mulut dan permusuhan antara petani, sehingga dibutuhkan sebuah aturan yang jelas dalam pembagian air di mana konflik yang terjadi dimasyarakat bisa teratasi. Dengan demikian peran pemerintah Desa sangatlah penting, karena pemerintah Desa dianggap dapat menengahi apabila ada permasalahan diantara para petani yang sedang mengalami konflik yang ditimbulkan dari pengelolaan irigasi. Namun peran pemerintah harus didukung penuh oleh masyarakat petani untuk menengahi permasalahan tersebut, karena peran petani juga sangat penting agar lebih terorganisir.

³ Nadjadi Anwar, *Pengembangan*, hal. 104

1.3. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana bentuk konflik yang terjadi dari pengelolaan irigasi di kalangan petani Kampung Ciroke Desa Cidadap Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka?
- 1.3.2 Bagaimana pola pengelolaan irigasi dalam mencegah konflik di kalangan petani Kampung Ciroke Desa Cidadap Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan penulis terkait rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk konflik yang terjadi dari pengelolaan irigasi di kalangan masyarakat petani Kampung Ciroke Desa Cidadap Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.
- 1.4.2 Untuk mengetahui pola pengelolaan irigasi dalam mencegah terjadinya konflik di kalangan petani Desa Cidadap Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademis maupun masyarakat sebagai pengetahuan dan serta dapat memperluas pengetahuan

dalam bidang sosial, terutama mengenai Pola Pengelolaan Irigasi Dalam Mencegah Terjadinya Konflik (Penelitian Pada Masyarakat Petani di Kampung Ciroke Desa Cidadap Kabupaten Majalengka).

1.5.2 Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan pada petani *pertama*, terutama dalam pengelolaan aktifitas pertaniannya, menyangkut irigasi air dan diharapkan dapat berguna untuk bahan bacaan. *Kedua*, Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan maupun masukan agar pemerintah dapat mengatasi masalah tentang tata pengelolaan saluran irigasi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Setiap hari kadang kita tidak tahu manfaat akan kegunaan air, karena kita hanya menggunakan saja tanpa berfikir panjang. Bahkan kita membuang sampah sembarangan dan tidak tahu tentang akibat kedepannya, dan tanpa kita sadari sampah yang kita buang akan menghambat aliran air bahkan mencemari air. Banyak aliran sungai yang tersendat oleh banyaknya sampah yang dibuang tanpa sengaja maupun disengaja, sehingga saluran irigasi air akan terhambat.

Air irigasi merupakan sarana penting dalam usaha peningkatan produksi pertanian, tidak sedikit usaha maupun pemodal sebelum air mengucur ke petak area pesawahan, pengelolaan irigasi tidak selamanya dimaksudkan oleh pemerintah sebagai sarana keuntungan semaksimal mungkin, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk menciptakan suatu suasana usaha tani yang bersifat untuk

membantu petani miskin, meratakan pendapatan, meningkatkan taraf hidup yang layak dan lain-lain⁴.

Pengelolaan irigasi tentu ada strategi diantaranya strategi alternatif untuk mengembangkan prasarana irigasi, mencakup strategi investasi dalam membangun proyek-proyek baru, merehabilitasi jaringan-jaringan irigasi lama, memperbaiki eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Tujuan strategi alternatif yaitu untuk meningkatkan potensi sebuah Negara atau Desa dalam produksi pertanian yang kondusif.

Peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 48/PRT/1990. Tentang pengelolaan air dan sumber air pada wilayah sungai. Wewenang pengelolaan air atau sumber air yang berada pada wilayah sungai merupakan peraturan menteri yang dilimpahkan dalam tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Wilayah sungai yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dilaksanakan dalam ruang lingkup tugas Dinas yang akan diatur lebih lanjut oleh kepala dinas yang bersangkutan dengan persetujuan gubernur sebagai kepala daerah. Pemerintah daerah yang bersangkutan bertanggungjawab atas pelaksanaan wewenang pengelolaan air⁵.

Pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air

⁴ A. Hafied A. Gany, *Prisma*, Lingkungan Hidup dalam Pembangunan, (Jakarta: Penerbit Andi, 1979), hal, 60.

⁵ Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Pengairan, *Himpunan Peraturan Menteri PU di Bidang Pengairan*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), Hal. 117.

sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawab. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air secara berkesinambungan dan berkelanjutan⁶.

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu⁷.

Pengaturan saluran irigasi tentu tidak lepas dari pengamatan pemerintah desa karena kalau tidak diamati oleh pemerintah setempat, pembagian air irigasi akan saling berebut yang menimbulkan terjadinya pertikaian antar petani (konflik). Lewis A. Coser yang dikutip oleh K.J Veeger M.A dalam bukunya *realitas sosial* menyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, di mana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka. Konflik juga dapat berlangsung antara individu-individu, kumpulan-kumpulan (*collectivities*), atau antara individu dengan kumpulan. Bagaimana pun konflik baik yang bersifat antarkelompok maupun yang intrakelompok (*intern*), selalu ada ditempat orang hidup bersama⁸.

⁶ Robert j. Kadoantie, *Kajian Undang-Undang Sumber Daya Air*,(Jakarta.Penerbit: Andi. 2003), hal. 66

⁷ *Ibid*, hal. 67

⁸ K.J. Veeger, *Realita Sosial*, (Jakarta: Gramedia 1985), hal. 211

Keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan. Kuatnya potensi konflik antar organisasi maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang setiap saat akan mengundang terjadinya tindak kekerasan, seperti pertandingan olahraga, kampanye partai, unjuk rasa, hubungan antar pribumi-nonpribumi yang kurang harmonis akan mengakibatkan pertikaian diantara mereka sehingga kelompok-kelompok tersebut dapat mengalami tindakan kekerasan⁹.

Lewis A. Coser membagi konflik dalam dua bagian diantaranya konflik *realistik* dan konflik *non-realistik*. Konflik *realistik* mempunyai ciri-ciri tertentu, dan ciri-ciri tersebut adalah Konflik muncul dari frustrasi atas tuntutan dalam keinginan untuk mendapatkan sesuatu (*expectations of gains*). Konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Dengan kata lain, konflik realistik sebenarnya mengejar: power, status yang langka, *resources* (sumber daya), dan nilai-nilai. Konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir. Karena itu, pada konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pilihan-pilihan amat tergantung pada penilaian partisipan atas kemujaraban yang selalu tersedia.

⁹ Selo Soemardjan, *Menuju Tata Indonesia Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000), hal. 210.

Konflik *non-realistik*, Sekalipun melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan, namun ada keinginan untuk membebaskan ketegangan setidak-tidaknya pada salah satu dari mereka. Dalam kasus ini, pilihan pihak lawan bergantung pada sebab-sebab yang tidak secara langsung berhubungan dengan isu perselisihan. Dibandingkan konflik realistik, konflik *non-realistik* kurang stabil atau memiliki tingkat stabilitas yang lebih rendah. Pilihan-pilihan fungsional bukan sebagai alat, tetapi objek itu sendiri¹⁰.

Dahrendrop melihat ada tiga permasalahan yang tidak dapat terlepas dari masyarakat konflik diantaranya kekuasaan, kepentingan, dan kelompok konflik. *Kekuasaan* merupakan kemampuan untuk memenangkan kemauan sendiri, jika kemauan itu bertentangan dengan kemauan orang lain, pada dasarnya pihak yang lebih kuat fisiknya mampu mengalahkan pihak lain. *Kepentingan* merupakan perbedaan-perbedaan berlawanan (*antagonitis*) diantara mereka yang bersangkutan, pihak-pihak yang sedang berwenang mempunyai *ruling interest* yang berlainan dari kepentingan pihak yang dikuasai. *Kelompok konflik* merupakan sejumlah orang yang mempunyai kepentingan bersama entah kepentingan itu disadari entah tidak disadari namun mereka belum berorganisasi dan bersatu¹¹.

Konflik yang di akibatkan suatu kelompok atau masyarakat juga dapat dipendam sebagaimana yang dikemukakan Coser bahwa konflik kepentingan-kepentingan yang berlawanan atau perasaan yang saling bermusuhan dapat di pendam atau ditekan *repressed*, pada umumnya ada dua konsekuensi

¹⁰ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jogyakarta: Ar-ruzz Media, 2008), hal. 232-233.

¹¹ Selo Soemardjan, *Menuju*, hal. 214-218

dipendamnya konflik. Pertama, dipendamnya konflik dapat mengakibatkan putusya hubungan, kalau keterlibatan emosional para anggotanya sudah tinggi dengan meledaknya konflik semakin parah maka ketegangan dan permusuhan dapat menjadi bentuk amukan yang keras. Sebaliknya jika putusya hubungan yang ditimbulkan oleh konflik yang bersipat sekunder, maka konflik yang terpendam mungkin hanya berupa sikap apatis yang semakin lama semakin menghilang. Kedua, dipendamnya konflik mengelakakan perasaan bermusuhan dari sumber yang sebenarnya dan memberikan sebuah alternatif, alternatif tersebut merupakan sejenis katup penyelamat *safety value* di mana dorongan-dorongan agresif atau permusuhan dapat diungkapkan dengan cara-cara yang tidak mengancam atau merusak solidaritas. Misalnya ketegangan antarpribadi dapat diungkapkandalam berbagai bentuk jenaka atau lelucon. Permusuhan yang dipendam juga dapat disalurkan dalam kompetisi pertandingan¹².



¹² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hal. 201.